

PERAN *AGILE GOVERNANCE* DALAM OPTIMALISASI POTENSI WISATA BERKELANJUTAN DI KELURAHAN NYAMPLUNGAN

M. Chasan Amrulloh¹, Fatma Putri Nuriawati², Selvina Rosi S.L.³, Yoga Eka Saputra⁴, Galuh Nilam Sari⁶, Daniel Dwi Pangarso⁷, Muhammad Afifudin⁸, Fandi Nur Faizi⁹, Arkhan Haikal¹⁰, Muhammad Rendy Eflizar Julian¹¹, Roziana Febrianita¹²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya

e-mail : kknupnvjt.68@gmail.com

Abstrak

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan salah satu daerah yang memiliki potensi destinasi wisata berkelanjutan yang sangat tepat dalam dikembangkan mulai dari pembentukan pengurus wisata hingga perencanaan wisata. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan strategi pengembangan potensi wisata dalam optimalisasi wisata berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pengembangan potensi wisata berkelanjutan di Kelurahan Nyamplungan. Analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *agile governance* yang memiliki 6 prinsip yaitu *good enough governance*, *business driven*, *human focused*, *based on quick wins*, *systematic and adaptive approach*, dan *simple design and continuous refinement*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat sadar akan kaya potensi destinasi wisata berkelanjutan yang dapat dikembangkan di Kelurahan Nyamplungan.

Kata Kunci: Pengembangan Wisata, *Agile Governance*, Nyamplungan

Abstract

Tourism development is one of the efforts to develop or advance tourist attractions so that the attraction is better and more interesting in terms of places and objects in it to be able to attract tourists to visit it. One of the areas in East Java Province, Surabaya City, Cantian Customs Subdistrict, Nyamplungan Village is one of the areas that have the potential of a very appropriate tourist destination is being developed ranging from the formation of tourist administrators to tourist planning. The problem in this research is describing the strategy of developing tourism potential in the optimization of sustainable tourism. The purpose of this research is to describe the strategy of developing sustainable tourism potential in Nyamplungan Village. The theoretical analysis used in this research is agile governance which has 6 principles, namely good enough governance, business-driven, human-focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinement. This research uses a type of qualitative research that is descriptive with data collection techniques conducted through observation techniques, interviews, documentation, and previous research. The results showed that not yet fully the public is aware of the rich potential of sustainable tourist destinations that can be developed in the village of Nyamplungan.

Keywords: Tourism Development, Agile Governance, Nyamplungan

PENDAHULUAN

Pengembangan wisata berkelanjutan merupakan salah satu usaha untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional pada pembukaan UUD 1945. Pembangunan inklusif perlu diciptakan untuk mendukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkesinambungan. Pembangunan inklusif hadir atas kegelisahan masyarakat terhadap pengaruh pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan yang ujungnya hanya menimbulkan kehidupan yang eksklusif. (Anggarini, 2021)

Pembangunan mestinya dimulai dari unit pemerintahan yang paling bawah, yaitu pada tingkat pemerintahan desa. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan, karena banyak penduduk Indonesia bermukim di wilayah Kota. Jumlah desa yang terpecah di wilayah Indonesia saat ini berjumlah 416 Kota. Oleh karena itu, desa merupakan suatu daerah strategis sebagai

bagian dari pembangunan berkelanjutan dalam proses identifikasi permasalahan di dalam masyarakat serta perencanaan terkait realisasi tujuan negara di pedesaan. Dibandingkan dengan kota, desa masih dipandang sebagai daerah yang tertinggal dari aspek ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan sarana prasarana yang ada di kota.

Pembangunan inklusif merupakan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk dapat aktif dalam proses kegiatan pengembangan desa atau tujuan dari desa dan juga untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang memiliki basisi luas, serta tidak dapat mengurangi ketidakesetaraan dalam pendapatan terhadap kepala keluarga. Menurut (Jannah, 2019) Pembangunan inklusif di suatu desa menjadi hal yang penting dan tidak terpisahkan antara sinergi terhadap pembangunan daerah maupun nasional. Dalam hal ini, tentunya di dalam pembangunan berkelanjutan berlandaskan pemahaman desa sebagai kesatuan geografis. Dalam menilik atau mengkaji potensi desa dilakukan untuk tersusunnya suatu peta secara rinci dan menjadikan landasan sebagai potensi sumber daya alam yang bisa untuk dipergunakan atau untuk pengembangan di desa tersebut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu untuk terus digalakkan dalam pemanfaatan potensi destinasi wisata yang terdapat pada desa tersebut, sehingga semakin lebar adanya lowongan pekerjaan dan adanya peningkatan ekonomi dan sosial. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Nyamplungan adalah melalui pemerintahan desa yang diberikan kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengelola secara mandiri melalui lembaga ekonomi maupun lembaga lainnya. Maka dari hal tersebut, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui lembaga ekonomi yang berperan sebagai pengelola potensi ekonomi tingkat desa untuk kemakmuran desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (Chintary, 2016)

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat berdasarkan pemenuhan kebutuhan dan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDesa adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDesa memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga profitabel melalui penawaran potensi lokal yang dimiliki desa yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Aset BUMDesa berasal dari keikutsertaan modal dari pemerintah desa dan modal dari masyarakat desa. BUMDesa harus memiliki perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa. (Sholihah, 2020)

Salah satu daerah di Jawa Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Nyamplungan, Kota Surabaya merupakan desa yang memiliki potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan oleh pemerintahan desa melalui pembentukan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam memanfaatkan potensi desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memberikan fasilitas maupun memberikan edukasi kepada masyarakat akan kaya potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan yang dapat memberikan lowongan bekerja bagi kelurahan tersebut dan dapat memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) setiap tahunnya.

Kelurahan Nyamplungan yang memiliki luas wilayah 0,55 Km, penduduk di Kelurahan Nyamplungan kurang lebih 8.947 jiwa penduduk. Potensi destinasi wisata di Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kabupaten Kota Surabaya meliputi potensi wisata edukasi dan wisata ecowisata yang sangat berpeluang besar dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata secara efektif, transparan, dan efisien. Dalam hal ini, letak geografis tidak terlepas, sehingga potensi dalam pemanfaatan alam bisa mengembangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pengurangi angka pengangguran yang terdapat di Kelurahan Nyamplungan. Maka dari hal tersebut, diperlukan suatu tata kelola organisasi publik yang mampu untuk memberikan kebermanfaatan secara cepat bagi desa terkait.

Agile governance atau disebut pemerintahan yang cakap, langkas serta cepat untuk merespon dan mengkoordinasikan seluruh bagian organisasi. Konsep agile governance sudah sering dibahas di dunia akademis, terlebih pada ilmu administrasi publik. Metode *agile governance* ini melakukan penyederhanaan terhadap birokrasi, berfokus pada kecepatan dan ketangkasan, unik, dan berfikir out of the box menjadikannya sebagai keunggulan dari konsep ini. Dalam hal tersebut biasanya agile governance lebih sering digunakan oleh dunia usaha swasta. Namun perubahan dialektika membuat pemerintah tidak boleh mengalami ketertinggalan. Inovasi dan praktik yang muncul dari filosofi tangkas dan cepat menjadi suatu hal yang diharapkan oleh publik. (Luna et al., 2010)

Dari uraian diatas bahwa peneliti dapat mendeskripsikan tentang penerapan *agile governance* dalam mengoptimalkan potensi destinasi wisata di Kelurahan Nyamplungan, Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “ Peran *Agile Governance* dalam Optimalisasi Potensi Wisata Berkelanjutan di Kelurahan Nyamplungan”.

METODE

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif jenis penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan peran *agile governance* dalam optimalisasi potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan menggunakan 6 prinsip pada teori *agile governance* yang telah diangkat Alexander (2010). Penelitian kualitatif memiliki landasan yang cukup kuat, baik dalam tataran filosofis maupun metodologis. Menurut Sugiyono dikutip (Prasanti, 2018) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah dalam sebuah penelitian yang akan digunakan meneliti terhadap suatu objek pada alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai suatu instrumen kunci, teknik, cara pengumpulan data yang dilaksanakan secara gabungan, analisis data yang bersifat induktif, serta hasil dari penelitian kualitatif yang lebih mengutamakan pada penekanan terhadap makna ketimbang generalisasi.

Menurut (Mulyadi, 2019) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data indepth, data yang mengandung makna. Artinya adalah data aktual, data harus menjadi nilai di luar data yang muncul Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi atau disebut transferabilitas, tetapi lebih menekankan pada arti. Sedangkan tujuan deskriptif Penelitian adalah untuk membuat deskriptif, faktual, dan deskripsi yang akurat tentang fakta-fakta dan Karakteristik dari populasi tertentu atau area. Sebagai tambahan Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian meja, data dikumpulkan didasarkan pada sumber yang ada. Analisis yang dilakukan juga menggunakan data sekunder dari buku, berita, ilmiah pasal dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana peran *agile governance* dalam optimalisasi potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam mengelola potensi wisata Kelurahan Nyamplungan

Peran pemerintah Kelurahan Nyamplungan dalam mengola potensi wisata yaitu menjaga, berpartisipasi dan melakukan pemeliharaan dalam menjaga potensi wisata yang berupa peninggalan sejarah khususnya dalam potensi wisata edukasi sejarah kota tua karena lokasi kelurahan yang masih didalam *Old Town* Kota Surabaya. Dalam melakukan pemeliharaan wisata, selama pandemi tidak jarang melakukan pemeliharaan serta bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk merevitalisasi tempat-tempat tertentu yang perlu dilakukan perbaikan dalam bentuk keindahannya. Dalam implementasi revitalisasi dan pemeliharaan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan peran BUMdes, dan POKDARWIS, seperti keanggotaan sumber daya manusia yang tidak konsisten dalam partisipasi upaya pengembangan desa wisata, sehingga pemerintah juga tidak bisa mempercayakan suatu program dan ide yang akan digagas bersama, sehingga pengembangan BUMDes dinilai tidak berjalan karena patokan masyarakat yang cenderung belum dapat diajak maju. Keterlambatan juga dirasakan pada pengembangan POKDARWIS karena komunikasi dan tatanan organisasi yang dinilai kurang mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan dalam tatanan organisasi. Tetapi pemerintah Kelurahan Nyamplungan tidak membuat hal tersebut sebagai patokan keberhasilan pemeliharaan dan pelestarian wisata budaya, dalam penyelenggaraanya pemerintah mampu mengajak masyarakat dalam berkoordinasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam pelestariannya, sehingga terdapat 3 peran pemerintah Kelurahan Nyamplungan dalam upaya pengembangan wisata yaitu:

- a) Sebagai mediator untuk memberikan fasilitas pelatihan masyarakat terkait dalam upaya pelaksanaan pelestarian dan pemeliharaan wisata kelurahan
- b) Sebagai fasilitator untuk pelaksanaan program kelurahan dalam pelaksanaan sosialisasi untuk gerakan pentingnya pelestarian wisata atau sadar wisata akan suatu potensi lokasi wisata yang terdapat di Kelurahan Nyamplungan

- c) Sebagai pemberdayaan untuk melakukan pengelolaan masyarakat sadar wisata sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tujuan didirikannya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kelurahan Nyamplungan dalam kepentingan pelestarian potensi wisata yang dihasilkan dari Cagar Budaya, mengembangkan dan memperkenalkan adat istiadat budaya setempat, yang dapat dikembangkan untuk proyek pengembangan wisata tingkat kelurahan atau kecamatan. Pembentukan POKDARWIS diharapkan dapat menggerakkan masyarakat sekitar tidak hanya melalui Komunitas Informasi Masyarakat, melainkan kesadaran akan diri sendiri dalam pelaksanaan sadar wisata dan budaya yang dimiliki suatu daerah.

Upaya POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian dalam memetakan potensi wisata

Terlepas dari peran masyarakat Kelurahan Nyamplungan, POKDARWIS tingkat Kecamatan Pabean Cantian Surabaya memiliki rasa sadar wisata yang tinggi akan potensi peninggalan sejarah yang dimiliki di kebanyakan lokasi Kota Tua. Dari ketersediaan pemerintah Kelurahan Nyamplungan, POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian berupaya mengumpulkan aspirasi dan bukti nyata pemetaan wisata dalam bentuk dokumentasi sejarah, cerita tertulis, artikel peninggalan. POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian berupaya menyelamatkan atau mengkoordinir penyampaian pengajuan keaslian sejarah pada Tim Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur guna menjaga keaslian suatu peninggalan agar tidak dirusak atau tidak terawat. Adapun upaya yang sudah dilakukan POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian dalam upaya menjaga keaslian bentuk bangunan, atau fisik suatu peninggalan sejarah yaitu:

- a) Perencanaan pergantian plakat baru yang dapat terlihat jelas di Crane Putar peninggalan sejarah pada Penjajahan Belanda
- b) Publikasi klenteng tertua di Surabaya yaitu Klenteng Hok Tien Hian dan Wayang Potehi
- c) Pengajuan surat keaslian sejarah untuk Sumur Tua di Makam Gemuk yang terletak di RW 04 RT 02 Kelurahan Nyamplungan

Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata di daerah yang mencakup Kelurahan Nyamplungan keberadaannya dinilai sangat membantu penyelenggara pemerintah dalam melakukan tugas untuk menjadi kelompok masyarakat yang sadar dan melindungi kekayaan potensi wisata didalam suatu wilayah. Jika Kelompok masyarakat ini mampu bekerja sama dengan penyelenggara pemerintah dan ditopang kebijakan serta fasilitas yang memadai, maka pertumbuhan masyarakat yang sadar akan wisata dan aset peninggalan wisata akan meluas dan mampu menjadi dikembangkan menjadi wisata yang berkelanjutan.

Dari bahasan tersebut sudah dapat dilihat bahwa POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian berupaya dalam meneliti dan mengumpulkan peninggalan sejarah dan potensi wisata baru dalam wisata edukasi, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar kelompok sadar wisata, dimana masyarakat itulah yang akan memelopori serta mengajukan kepedulian mereka terhadap budaya serta peninggalan sejarah lain di Kelurahan Nyamplungan dan Kecamatan Pabean Cantian. Namun, kurangnya perhatian penyelenggara pemerintah membuat POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian seringkali merasa kurang dimanfaatkan potensinya.

SIMPULAN

Peran pemerintah Kelurahan Nyamplungan dalam mengola potensi wisata yaitu menjaga, berpartisipasi dan melakukan pemeliharaan dalam menjaga potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan. Dalam implementasi revitalisasi dan pemeliharaan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan peran BUMdes, dan POKDARWIS tingkat Kelurahan Nyamplungan. Dalam melakukan pemeliharaan wisata, kelurahan setempat bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya. Dalam hal ini, perangkat masyarakat seperti BUMdes dan POKDARWIS sangat dibutuhkan perannya untuk keberlanjutan pemeliharaan potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan. Akan tetapi, untuk saat ini, pengembangan BUMdes dan POKDARWIS masih mengalami beberapa hambatan sehingga tidak bisa berjalan dengan baik.

SARAN

Pengelolaan Wisata Kelurahan Nyamplungan, Pihak-pihak yang berperan sebagai pengelola wisata seperti POKDARWIS ataupun BUMdes dan masyarakat Nyamplungan yang terlibat dalam pembentukan sentra wisata diharapkan mampu mempertahankan dan memberdayakan wisata yang sudah ada agar berkelanjutan. Pemberdayaan Wisata Kelurahan Nyamplungan, Pemerintah daerah setempat perlu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sebagai penggerak dan pengelola potensi wisata di Kelurahan Nyamplungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada UPN Veteran Jawa Timur, PT Boma Bisma Indra, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, serta masyarakat Kelurahan Nyamplungan karena telah memberikan dukungan dan ikut andil dalam keberlangsungan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik MBKM di Kelurahan Nyamplungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, D. T. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19. *Jurnal Pariwisata*, 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9809>
- Chintary, V., & Lestari, A. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 5(2), 101802.
- Jannah, U. (2019). *Strategi bauran komunikasi pemasaran obyek wisata baru (studi deskriptif wisata bukit kapur setigi di desa sekapuk kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik)*.
- Luna, A., Costa, C., Moura, H., Novaes, M., & Nascimento, C. (2010). Agile Governance in Information and Communication Technologies: Shifting Paradigms. *JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management*, 7(2), 311–334. <https://doi.org/10.4301/s1807-17752010000200004>
- Mulyadi, M. (2019). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Sholihah, N. M. (2020). *Analisis Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk*. 1–14. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/5698>